

DAMPAK INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN KESEMPATAN KERJA REGIONAL DI INDONESIA

Oleh :

Anita S. Wartaman* dan Raldi H. Koestoer**

Abstrak

Iklim investasi merupakan salah satu isu krusial di Indonesia, sebagaimana yang disebutkan dalam *White Paper* dan *President Decree No. 87 Tahun 2003*. Investasi dapat mendorong perbaikan aspek ketenagakerjaan di mana tulisan ini memfokuskan pada dua aspek, yaitu *pertama*, untuk menemukan karakteristik investasi paska krisis moneter, dan *kedua*, bagaimana dampak ikutannya bagi penyerapan tenaga kerja di tingkat regional di Indonesia, terutama yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Terdapat perbedaan yang nyata dari dampak induksi investasi terhadap penyerapan tenaga kerja antara wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur.

Investment Climate is one of the crucial issues in the country as stated in the White Paper and President Decree No 87 of 2003. Through investment, it is expected the employment is encouraged the national economy. This paper focusses on two major points, firstly, characteristics of investment in post crisis program and, secondly, how it impacts on employment in the regions of Indonesia, especially in West and Eastern Indonesia with certain quality in human resources. The outcomes indicate that the diversity of regional investment and labour absorption with specific quality of human resources. The former refers to regional variations and the latter gives the impacts on employment with specific level on human quality resources. There would be a significant difference between West and Eastern Indonesia to impose the impact of investment inductions in several areas with specific patterns emerge.

Keywords: Investasi; Kesempatan kerja; Kualitas sumber daya manusia; Indonesia Bagian Barat; Indonesia Bagian Timur

* Dosen dan Peneliti Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Arsitektur Landsekap & Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti. E-mail: ralkoest@yahoo.co.uk

** Dosen dan Peneliti Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Arsitektur Landsekap & Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti. E-mail: asitawati@yahoo.com

PENDAHULUAN

Sebagaimana disebutkan dalam Keppres 87/2003 tentang Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, pemerintah telah menunjukkan orientasi yang jelas terhadap kebijakan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi ketertinggalan pembangunan pada saat dilanda krisis yang lalu (Menko Perekonomian, 2005). Dalam kaitan tersebut, salah satu unsur penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Munculnya kebijakan tersebut cukup beralasan karena dalam dua tahun terakhir ini, kondisi arus masuknya penanaman modal masih terlihat stagnan. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan rencana pemerintah yang telah mencanangkan tahun 2002-2003 sebagai tahun tata niaga, dan kemudian dicanangkan tahun 2003 hingga 2005 sebagai tahun investasi (BKPM, 2005). Kebijakan terkait dengan iklim investasi juga tertuang dalam Inpres No.3 Tahun 2006. Meskipun demikian, tidak bisa dihindari bahwa keterpurukan ekonomi sebagai akibat dari krisis moneter tahun 1997/98 yang telah memukul kondisi ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan.

Hal yang semakin jelas dengan semakin membengkaknya tingkat pengangguran, di mana penciptaan lapangan kerja dapat dikatakan relatif terhambat, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) justru semakin meningkat. Saat IMF memberi bantuan secara bertahap pemulihan dirasakan dampaknya, namun bantuan IMF ini pun dimaksudkan untuk mempercepat penciptaan kesempatan kerja yang merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi. Ketergantungan terhadap IMF tidak bisa dilaksanakan terus menerus sehingga pemerintah, melalui Inpres No 5/2003 bulan September berupaya untuk mempersiapkan tahapan pembangunan tanpa menggunakan 'infus' IMF tersebut. Disusul kemudian dengan Keppres 87/2004 guna mendorong ekspor dan investasi.

Makalah ini berupaya untuk mengungkapkan dua hal utama, yaitu pertama, mengobservasi kondisi investasi pada masa *recovery*, atau pascakrisis, dan kedua, bagaimana dampak ikutannya bagi penyerapan tenaga kerja di tingkat regional pada tahapan waktu berikutnya. Rentang waktu bagi informasi investasi digunakan pada basis tahun 2000-01, dan data yang digunakan adalah realisasi investasi menurut BKPM yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI). Sementara dampak ikutan bagi tenaga kerja ditinjau menurut batasan waktu 2 tahun berikutnya, yaitu menurut data Sakernas tahun 2003 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

ULASAN DAN METODA DASAR

Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai investasi PMDN tahun 2000 adalah sebesar Rp88.294,7 juta yang merupakan puncaknya nilai investasi, sementara tingkat investasi tahun 2002 hanya mencapai sekitar 50%-nya. (Bank Indonesia, 2003). Ini tercermin dari data nilai persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan pananaman modal asing (PMA) yang dikeluarkan Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2004).

Situasi tersebut berdampak terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Bappenas, sumbangan investasi dalam pembentukan PDRB menurun dari 29,5% pada tahun 1996 (sebelum masa krisis) menjadi 20,2% pada tahun 2002 (Bappenas, 2003: 1-3). Menurunnya kemampuan perekonomian tersebut akan berdampak negatif pada penciptaan lapangan kerja. Sementara meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Di sini, sudah dapat diduga adanya kecenderungan yang sama terhadap dampak peningkatan investasi. Dengan demikian, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja merupakan tiga unsur yang saling terkait. Namun di sisi lain, terdapat indikasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini didorong oleh faktor konsumsi (C). Oleh sebab itu, meskipun perekonomian meningkat, namun penciptaan lapangan kerja relatif sangat lambat (Bappenas, 2003: 1-22).

Berdasarkan ulasan di atas, makalah ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan investasi dan tingkat penyerapan tenaga kerja, yaitu pertama, bagaimana fakta dinamika investasi dalam masa *recovery* dan seberapa besar dampaknya dalam menciptakan lapangan kerja. Kedua, bagaimana refleksi investasi pada tingkat makro secara regional. Metode sederhana yang diterapkan di sini adalah mengkaitkan tipe investasi, baik PMA maupun PMDN, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja, di mana kemunduran atau penurunan investasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak menarik disertai dengan pengangguran yang meningkat (Sugiyarto, 2005). Selain itu, bagi kepentingan kelenturan investasi, pemilihan lokasi cukup beralasan sehingga perlu ditinjau secara makro menurut region, yaitu, wilayah-wilayah yang terletak di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dalam metode *input output* (tabel I/O) diketahui bagaimana peranan induksi investasi pada salah satu sektor kunci dan dampaknya terhadap sektor lainnya, termasuk penyerapan tenaga kerja. Pada dasarnya dalam Tabel I/O dengan model multisektor, peneliti dapat memahami peran multisektor melalui metode pembalikan matriks (*inverse matrix*) di mana nilai koefisien mengacu pada besaran peran suatu sektor ekonomi secara relatif terhadap sektor lainnya. Demikian pula, besaran koefisien penyerapan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Silogisme yang sama dapat dituangkan dalam agregasi nilai keseluruhan investasi menurut wilayah. Dalam data investasi menurut wilayah atas dasar nilai investasi yang direalisasikan dan dicatat BKPM dan BI dapat diketahui nilai tertimbang secara relatif bagi penyerapan tenaga kerja. Namun, karena dampak investasi di suatu wilayah tertentu tidak secara langsung dapat menciptakan lapangan kerja maka sebagai *proxy*-nya diambil data sakernas pada perioda waktu berikutnya, yaitu 2 tahun berikutnya. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa investor membutuhkan waktu tertentu dalam mempersiapkan pengembangan usahanya yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan usaha.

Secara singkat, ulasan ini meliputi (i) Dinamika investasi PMDN dan PMA di wilayah KBI dan KTI, (ii) Situasi tenaga kerja di wilayah KBI dan KTI, dan (iii) Peranan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah KBI dan KTI. Indikasi data yang digunakan adalah data tahun permulaan (tahun 2000-an), guna mendapatkan ilustrasi dampak pada tahun-tahun berikutnya terhadap tenaga kerja.

KERAGAMAN INVESTASI DI TINGKAT REGIONAL

Daya tarik investasi bergantung pada banyak faktor. Hasil kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan bahwa sumber daya alam migas, faktor keamanan, dan iklim usaha yang kondusif merupakan prioritas utama bagi investor (Kompas, 25 Januari 2002). Selain itu, aspek stabilitas politik dan keamanan, meskipun tidak mencukupi merupakan prasyarat yang sangat penting bagi keberlangsungan investasi. (Bappenas, 2003:IV-5). Di lain pihak, belum mantapnya program desentralisasi secara tidak langsung juga berdampak terhadap minat investasi di mana dari sisi kebijakan ditandai dengan adanya keragaman yang besar antar kebijakan investasi antar daerah. Keragaman inilah yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan daya tarik investasi antar daerah. Untuk lebih jelasnya, Tabel 1 menunjukkan fluktuasi investasi PMDN dan PMA pada periode Agustus 2000 hingga Juli 2001.

Dari Tabel 1 yang bersumber dari laporan BI menunjukkan bahwa total investasi periode Agustus 2000 hingga Juli 2001 mencapai 244.333,60 miliar rupiah yang terbagi atas Rp 168,9 triliun di wilayah KBI dan Rp 75,4 triliun di KTI. Nilai investasi di wilayah KBI mencapai lebih dari dua kali nilai investasi di KTI sehingga hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan antara kedua wilayah tersebut. Sementara, daya saing investasi PMA di KBI tampaknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan KTI. Kondisi daya saing tersebut diilustrasikan dengan nilai persetujuan investasi PMA di KBI yang mencapai lebih dari tujuh kali nilai persetujuan investasi di KTI. Berbeda halnya dalam lingkup PMDN, nilai investasi PMDN tampaknya relatif seimbang antara KBI dan KTI.

Daya saing investasi PMDN Pulau Sumatra paling tinggi dibandingkan dengan region lainnya di wilayah KBI. Peralnya, lebih dari 60% investasi PMDN di KBI teraglomerasi di Pulau Sumatra, disusul oleh Pulau Jawa sekitar 30%, dan Pulau Bali yang kurang dari 1%. Hal sebaliknya terjadi dalam lingkup PMA di mana nilai investasi Pulau Sumatra hanya sekitar 30%, Pulau Jawa sekitar 70%, dan Pulau Bali sekitar 1%. Secara tidak langsung fakta ini menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar terhadap pemilihan sektor di mana di Sumatra terdapat banyak sektor perkebunan, dan migas yang mendapat dorongan PMDN, sementara di Jawa dan Bali cenderung berfokus pada sektor-sektor jasa dan perdagangan, selain manufaktur.

Untuk wilayah KTI, daya saing investasi PMDN tertinggi adalah Pulau Sulawesi akibat luas daratannya yang luas dan terdiri atas beberapa provinsi. Nilai investasi PMDN di pulau tersebut mencapai lebih dari 80% dari nilai total KBI. Di sisi lain,

Tabel 1. Realisasi PMDN dan PMA di KBI dan KTI Periode Agustus 2000- Juli 2001

Propinsi	Nilai Invests (M Rp)		Total
	PMDN	PMA	
NAD	154.00	15,440.25	15,594.25
Sumut	816.40	1,191.19	2,007.59
Sumbar	117.70	368.90	486.60
Riau	36,399.60	13,062.80	49,462.40
Jambi	575.30	2,144.55	2,719.85
Sumsel	683.30	2,112.25	2,795.55
Bengkulu	0.00	1.70	1.70
Lampung	652.40	322.15	974.55
SUMATERA	39,398.70	34,643.79	74,042.49
DKI Jakarta	3,971.80	27,230.60	31,202.40
Jawa Barat	8,220.90	25,029.95	33,250.85
Jawa Tengah	2,038.60	799.85	2,838.45
Yogyakarta	128.60	103.70	232.30
Jawa Timur	4,136.80	21,554.30	25,691.10
JAWA	18,496.70	74,718.40	93,215.10
BALI	450.00	1,232.50	1,682.50
JUMLAH KBI	58,345.40	110,594.69	168,940.09
NTB	1,273.00	11,979.82	13,252.82
NTT	1,081.10	8.67	1,089.77
Kalimantan Barat	12.00	563.55	575.55
Kalimantan Tengah	306.60	23.80	330.40
Kalimantan Selatan	3,051.50	1,027.65	4,079.15
Kalimantan Timur	1,453.20	158.10	1,611.30
KALIMANTAN	4,823.30	1,773.10	6,596.40
Sulawesi Utara	2,602.20	17.00	2,619.20
Sulawesi Tengah	1,328.30	118.15	1,446.45
Sulawesi Selatan	44,844.80	35.28	44,880.08
Sulawesi Tenggara	1,368.30	5.10	1,373.40
SULAWESI	50,143.60	175.53	50,319.13
MALUKU	0.00	955.40	955.40
PAPUA	3,180.00	197.20	3,180.00
JUMLAH KTI	60,501.00	15,089.71	75,393.51
Indonesia	118,846.40	125,684.40	244,333.60

Sumber: www.bkpm.go.id

daya tarik investasi PMA tertinggi di wilayah KTI dimiliki NTB di mana hampir 80% dari total investasi PMA di KTI berada di provinsi tersebut. Kelihatannya, fokus PMDN cenderung ke investasi di sektor perkebunan dan pertanian, di mana pada masa krisis, hasil bumi Sulawesi, terutama cengkeh, pala, dan rempah-rempah serta sejenisnya, sangat tinggi nilainya. Secara sepintas, saat itu Sulawesi tidak mengalami krisis, bahkan sebaliknya sehingga tidak mengherankan jika fokus investasi, khususnya PMDN cenderung tinggi di wilayah ini. Untuk NTB, penjelasan terhadap sektor pertambangan, khususnya PT Newmont, yang meskipun masih terjadi konflik antara pemerintah, PT tersebut dan masyarakat sekitarnya menjadikan nilai PMA meningkat.

Secara lebih rinci, distribusi spasial nilai investasi antar daerah/provinsi, nilai investasi tertinggi di wilayah Sumatra adalah Provinsi Riau diikuti NAD. Jika dibandingkan antara investasi PMDN dan PMA, minat investor PMDN di Propinsi Riau jauh lebih tinggi dibandingkan PMA. Kebalikan dengan itu, minat investor PMA di Provinsi NAD lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau. Selain keragaman potensi sumber daya alam, fluktuasi investasi di atas juga dapat mengindikasikan adanya keragaman iklim investasi antarregion. Keragaman iklim investasi tersebut dapat lebih jelas terlihat pada situasi investasi yang berbasis potensi sumber daya alam nonmigas.

Daya saing investasi tertinggi di Pulau Jawa adalah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sebabnya, DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan bisnis serta jumlah uang beredar di sini mencapai 60% sehingga tidak dapat dihindari memiliki daya saing investasi lebih kompetitif dibandingkan dengan daerah lainnya. Tingginya daya tarik investasi di Provinsi Jawa Barat sejalan dengan hasil temuan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)¹ di mana hasil kajiannya menempatkan daya tarik Kabupaten Bogor, Indramayu, dan Kabupaten Bekasi termasuk dalam 10 peringkat terbaik se Indonesia (Kompas, 2002). Selain itu, tampak bahwa minat investor PMA di kedua provinsi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PMDN (lihat Tabel 1).

Untuk wilayah KTI, daya saing investasi tertinggi di Pulau Kalimantan dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Pada wilayah tersebut, minat investor PMDN tampak lebih tinggi dibandingkan dengan PMA (lihat Tabel 1). Sementara, untuk Pulau Sulawesi, daya saing tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Hampir 100% investasi di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh PMDN. Seperti halnya Riau dan Aceh di atas, tingginya minat investasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan ini lebih disebabkan oleh aspek ketersediaan sumber daya alamnya.

Dengan demikian, dari seluruh provinsi di Indonesia dicatat tujuh provinsi yang memiliki nilai investasi di atas Rp10.000 m. Ke-tujuh region tersebut terdiri atas lima wilayah di KBI dan dua region di KTI. Lima wilayah di KBI meliputi Provinsi

¹ Kajian dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember 2001, menggunakan 7 (tujuh) indikator utama, yakni keamanan, potensi ekonomi, budaya, tenaga kerja, infrastruktur, peraturan daerah, dan keuangan daerah.

Tabel 2. Dinamika Investasi Antar Sektor Periode Agustus 2000 – Juli 2001 (Rp. Mil.)

Sektor	Investasi		Total
	PMDN	PMA	
Industri barang logam	1,599.86	3,922.75	5,522.61
Industri kayu	289.79	527.00	816.79
Industri kertas	11,272.32	6,304.45	17,576.77
Industri kimia dan farmasi	74,426.30	50,421.15	124,847.45
Industri lainnya	1,523.20	4,148.85	5,672.05
Industri logam dasar	315.44	4,056.20	4,371.64
Industri makanan	13,492.55	5,393.25	18,885.80
Industri mineral non logam	3,083.05	858.50	3,941.55
Industri tekstil	2,501.44	3,518.15	6,019.59
Kehutanan	452.90	685.95	1,138.85
Konstruksi bangunan	2,367.56	515.10	2,882.66
Listrik/perdagangan/jasa dll	2,000.81	21,907.90	23,908.71
Perhotelan	826.19	3,701.75	4,527.94
Perikanan	186.80	310.25	497.05
Pertanian	1,624.77	4,771.05	6,395.82
Perumahan dan perkantoran	437.90	2,031.50	2,469.40
Tambang	824.63	855.95	1,680.58
Transportasi	1,620.69	11,754.65	13,375.34
Total	118,846.20	125,684.40	244,530.60

Sumber : Bank Indonesia, 2004

Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Aceh, sedangkan dua wilayah lainnya di KTI adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan NTB.

Secara umum, ulasan terhadap fluktuasi investasi antar region di atas dapat mengindikasikan distribusi spasial penyerapan tenaga kerja antar region. Namun, situasi penyerapan tenaga kerja juga bergantung pada jenis usaha investasi. Untuk itu, Tabel 2 mengilustrasikan dinamika investasi antar sektor.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada periode Agustus 2000-Juli 2001, investasi di sektor kimia dan farmasi mendominasi investasi yang ada di Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 50% yang secara spesifik, sekitar 60% PMDN dan 40% PMA terkonsentrasi pada sektor tersebut. Selain sektor industri kimia dan farmasi, empat sektor lainnya yang memiliki nilai investasi di atas Rp1 trilyun, yaitu (i) sektor listrik/perdagangan/jasa dan lainnya, (ii) sektor transportasi, (iii) sektor industri makanan, dan (iv) sektor industri kertas. Melihat karakteristik usaha kelima investasi yang memiliki nilai tinggi di atas, dapat diindikasikan terdapat kesetaraan pengembangan usaha yang bersifat padat modal dan padat karya.

Jika dibandingkan antar PMDN dan PMA, minat PMDN pada sektor industri kertas dan makanan lebih tinggi dibandingkan dengan PMA. Investasi PMDN di kedua sektor tersebut mencapai sekitar dua kali investasi PMA. Sementara, pada sektor listrik/perdagangan/jasa dan lainnya serta sektor transportasi, minat PMA tampak jauh lebih tinggi dibandingkan PMDN. Perbandingan antara investasi PMA dan PMDN

mencapai 7 : 1. Gambaran terhadap dinamika investasi PMDN dan PMA tersebut dapat mengindikasikan minat investor PMDN lebih berorientasi pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat/konsumsi, sementara minat investor PMA lebih berorientasi pada sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan.

Di lain pihak, minat investasi di sektor kehutanan tampak sangat rendah, yaitu hanya mencapai sekitar 0,4% dari total nilai investasi (lihat Tabel 2). Lemahnya minat investasi di sektor ini kontra produktif dengan fakta bahwa Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam hutan yang sangat besar. Indonesia dikenal sebagai negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat menonjol dan menyebar. Sementara ekspektasi kebutuhan kayu dunia hingga tahun 2005 jauh melebihi kondisi persediaan yang ada (Koestoer, 2002: 27). Namun, bukan tidak mungkin hal ini disebabkan investor melihat aspek kepastian hukum yang tidak kondusif sehingga banyak di antara investor yang mengubah haluan di bidang lain. Di lain pihak, kasus-kasus *illegal logging* serta protes dari para pecinta lingkungan turut mewarnai situasi investasi di sektor kehutanan. Selain faktor permintaan pasar global dan ketersediaan sumber daya alam, keberadaan investasi kehutanan berdampak positif terhadap industri ikutan lainnya. Dampak positif tersebut terlihat dari tingginya nilai investasi di sektor industri kertas.

TENAGA KERJA DI KBI DAN KTI

Keterkaitan antara investasi dan tenaga kerja dapat ditunjukkan melalui pengembangan industri di suatu wilayah tertentu. Industri tersebut diharapkan menyerap tenaga kerja baik dari daerah tersebut maupun dari luar daerah. Jadi dengan induksi investasi, pertumbuhan ekonomi regional akan merupakan indikasi pertama yang dapat dilihat, dan kemudian disusul oleh penyerapan tenaga kerja.

Tidak lepas dari aspek investasi dan tenaga kerja, bagian ini akan mengulas informasi tentang ketimpangan angkatan kerja dan tenaga kerja antar daerah. Secara umum, perbandingan jumlah angkatan kerja antara wilayah KBI dan KTI mencapai hampir 5: 1, artinya KBI berpotensi lima kali lebih besar dibandingkan dengan wilayah KTI. Begitu pula dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya. Tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayah KBI lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah KTI. Ini terilustrasi dari perbandingan persentase angkatan kerja yang bekerja sebagai buruh tetap. Untuk lebih jelasnya, Tabel 3 mengilustrasikan keadaan tenaga kerja tahun 2003.

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebanyak 24,84% dari jumlah angkatan kerja di wilayah KBI bekerja sebagai buruh tetap. Sementara untuk wilayah KTI, jumlah angkatan kerja yang bekerja sebagai buruh tetap hanya mencapai 16%. Ini berarti tingkat penyerapan tenaga kerja buruh tetap di wilayah KBI lebih tinggi dibandingkan dengan KTI.

Tabel 3. Keadaan Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama Tahun 2003

Propinsi	Jumlah Angkatan Kerja	Pekerja/ Buruh/ Karyawan		Berusaha dengan Buruh Tetap	
		Jumlah	%	Jumlah	%
NAD	2,538,189.00	609,876.00	24.03	128,985.00	5.08
Sumut	5,159,678.00	1,214,676.00	23.54	111,221.00	2.16
Sumbar	1,947,876.00	378,756.00	19.44	56,532.00	2.90
Riau	2,385,328.00	861,738.00	36.13	45,575.00	1.91
Jambi	1,166,158.00	184,904.00	15.86	53,589.00	4.60
Sumsel	3,040,646.00	454,482.00	14.95	36,316.00	1.19
Bengkulu	727,484.00	85,414.00	11.74	11,008.00	1.51
Lampung	3,316,226.00	497,391.00	15.00	67,240.00	2.03
SUMATERA	20,281,585.00	4,287,237.00	21.14	510,466.00	2.52
DKI Jakarta	3,968,884.00	2,228,186.00	56.14	168,492.00	4.25
Jawa Barat	16,082,417.00	4,518,722.00	28.10	421,905.00	2.62
Jawa Tengah	16,257,270.00	3,371,778.00	20.74	443,064.00	2.73
Yogyakarta	1,756,662.00	457,287.00	26.03	46,555.00	2.65
Jawa Timur	18,097,118.00	4,044,036.00	22.35	541,536.00	2.99
JAWA	56,162,351.00	14,620,009.00	26.03	1,621,552.00	2.89
BALI	1,877,422.00	548,780.00	29.23	41,900.00	2.23
JUMLAH KBI	78,321,358.00	19,456,026.00	24.84	2,173,918.00	2.78
NTB	1,966,719.00	247,840.00	12.60	38,620.00	1.96
NTT	1,969,933.00	189,231.00	9.61	20,349.00	1.03
Kalimantan Barat	1,826,645.00	334,064.00	18.29	38,807.00	2.12
Kalimantan Tengah	842,969.00	102,769.00	12.19	40,231.00	4.77
Kalimantan Selatan	1,594,275.00	263,689.00	16.54	31,960.00	2.00
Kalimantan Timur	1,160,158.00	404,981.00	34.91	26,239.00	2.26
KALIMANTAN	5,424,047.00	1,105,503.00	20.38	137,237.00	2.53
Sulawesi Utara	853,548.00	220,146.00	25.79	48,351.00	5.66
Sulawesi Tengah	941,386.00	156,868.00	16.66	31,129.00	3.31
Sulawesi Selatan	3,457,525.00	563,477.00	16.30	84,498.00	2.44
Sulawesi Tenggara	852,505.00	111,054.00	13.03	21,382.00	2.51
SULAWESI	6,104,964.00	1,051,545.00	17.22	185,360.00	3.04
MALUKU	495,667.00	68,487.00	13.82	19,399.00	3.91
PAPUA	1,161,888.00	139,026.00	11.97	8,880.00	0.76
JUMLAH KTI	17,123,218.00	2,801,632.00	16.36	409,845.00	2.39
INDONESIA	95,444,576.00	22,257,658.00	23.32	2,583,763.00	2.71

Sumber : Badan Pusat Statistik, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2003

Di dalam KBI sendiri, tingkat penyerapan tenaga kerja dengan status buruh tetap, relatif sama dengan Pulau Sumatra, Pulau Jawa, dan Pulau Bali, yaitu berkisar 25%. Dari ke tiga wilayah itu, Pulau Bali menempati peringkat pertama dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 29,23%; kemudian disusul penyerapan di Pulau Jawa sebesar 26,03% dan penyerapan di Pulau Sumatera 21,14%. Adapun untuk wilayah KTI, tingkat penyerapan tenaga kerja, tertinggi dimiliki oleh Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 20,38% dan terendah NTT sebesar 9,61%. Secara spesifik, tingkat penyerapan tertinggi di KTI terletak pada Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 34,91%, kemudian diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara 25,79%. Dari 26 provinsi dalam ulasan ini, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi dalam tingkat penyerapan tenaga kerja. (lihat Tabel 3). Tingkat penyerapan tenaga kerja di provinsi ini hampir dua kali lebih tinggi dari umumnya provinsi lainnya.

Di lain pihak, antara KBI dan KTI terdapat kesetaraan dalam hal tingkat penyerapan tenaga kerja berstatus *employer*. Fenomena ini menarik mengingat pertumbuhan ekonomi di wilayah KTI jauh lebih rendah dibandingkan KBI. Untuk menjadi pekerja berstatus *employer* atau berusaha dengan buruh tetap dibutuhkan adanya jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai kondisi kualitas sumber daya manusia yang baik, jenjang pendidikan formal merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh oleh masyarakat. Tidak terlepas dari hal itu, dalam konteks kemandirian, kreativitas masyarakat lokal merupakan salah satu isu penting bagi terselenggaranya pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi (Sitawati, 2002 : 48).

Dalam tulisan ini penilaian terhadap kualitas pekerja akan didekati dari jumlah pekerja dengan pendidikan SMA ke atas terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Selanjutnya, Tabel 4 mengilustrasikan keadaan angkatan kerja yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkannya.

Dari Tabel 4 tampak kualitas pekerja yang berpendidikan SMA ke atas, relatif seimbang antara wilayah KBI dan KTI. Meskipun persentase pekerja yang berpendidikan SMA ke atas di KBI lebih tinggi dibandingkan dengan KTI. Namun ketimpangan tersebut relatif kecil, terpaut hanya sekitar 3%.

Dari seluruh provinsi dalam ulasan ini, Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase pekerja dengan pendidikan SMA ke atas tertinggi dibandingkan region lainnya. Persentase pekerja dengan pendidikan SMA ke atas provinsi tersebut sebesar 58,12%, lebih tinggi dua kali dibandingkan dengan rata-rata wilayah Indonesia yang sebesar 22,97%. Provinsi lainnya yang memiliki persentase pekerja dengan pendidikan SMA ke atas di atas rata-rata wilayah Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Sulawesi Selatan yang terletak di KTI. Provinsi Bali, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Bengkulu di KBI.

Jika dikaitkan dengan keberadaan investasi, Provinsi Bali yang memiliki nilai investasi relatif kecil, ternyata memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dari umumnya region-region di Indonesia. Kondisi yang sama terjadi pada Provinsi Yogyakarta, Bengkulu, dan Sumatra Barat (lihat Tabel 4). Berkebalikan dengan hal

Tabel 4. Keadaan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2003

Propinsi	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu (Jiwa)	Pendidikan yang Ditamatkan SMA Ke Atas	
		Jumlah	%
NAD	2,254,155.00	862,761.00	38.27
Sumut	4,595,268.00	1,381,269.00	30.06
Sumbar	1,749,020.00	498,848.00	28.52
Riau	2,133,627.00	763,833.00	35.80
Jambi	1,091,782.00	205,647.00	18.84
Sumsel	2,767,849.00	532,470.00	19.24
Bengkulu	673,239.00	175,117.00	26.01
Lampung	3,017,916.00	502,983.00	16.67
SUMATERA	18,282,856.00	4,922,928.00	26.93
DKI Jakarta	3,379,202.00	1,964,146.00	58.12
Jawa Barat	14,103,352.00	3,168,734.00	22.47
Jawa Tengah	15,124,082.00	2,331,902.00	15.42
Yogyakarta	1,658,103.00	529,537.00	31.94
Jawa Timur	16,525,698.00	3,221,650.00	19.49
JAWA	50,790,437.00	11,215,969.00	22.08
BALI	1,777,196.00	539,441.00	30.35
JUMLAH KBI	70,850,489.00	16,678,338.00	23.54
NTB	1,842,905.00	290,995.00	15.79
NTT	1,890,042.00	269,395.00	14.25
Kalimantan Barat	1,707,747.00	323,442.00	18.94
Kalimantan Tengah	779,968.00	132,407.00	16.98
Kalimantan Selatan	1,472,745.00	275,995.00	18.74
Kalimantan Timur	1,115,513.00	348,448.00	31.24
KALIMANTAN	5,075,973.00	1,080,292.00	21.28
Sulawesi Utara	803,574.00	245,520.00	30.55
Sulawesi Tengah	898,383.00	200,310.00	22.30
Sulawesi Selatan	2,870,757.00	666,517.00	23.22
Sulawesi Tenggara	765,783.00	169,759.00	22.17
SULAWESI	5,338,497.00	1,282,106.00	24.02
MALUKU	433,594.00	117,767.00	27.16
PAPUA	1,094,100.00	158,418.00	14.48
JUMLAH KTI	15,675,111.00	3,198,973.00	20.41
Total	86,525,600.00	19,877,311.00	22.97

Sumber: Sakernas 2003, BPS

itu, Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat yang memiliki investasi tinggi ternyata memiliki kualitas sumber daya manusia di bawah rata-rata wilayah Indonesia.

Secara umum, ilustrasi di atas mengindikasikan kualitas pekerja di Indonesia relatif kurang baik. Ini tercermin dari kecilnya persentase pekerja yang berpendidikan SMA ke atas, yaitu hanya mencapai 23%. Sementara, sisanya sebesar lebih dari 70% merupakan pekerja yang berpendidikan SMA ke bawah. Tidak terlepas dari hal itu, masalah penyerapan tenaga kerja sebetulnya tidak sepenuhnya bergantung atas kualitas pekerja itu sendiri, namun masih terdapat faktor lain yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah faktor kebijakan ketenagakerjaan yang ada.

PERANAN INVESTASI BAGI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KBI DAN KTI

Sebagaimana disebutkan di atas, investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator ekonomi makro. Pada bagian ini akan diulas dampak dari investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi, pertumbuhan PDRB dan penciptaan lapangan pekerjaan merupakan tiga unsur yang saling terkait. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan ini akan terealisasi apabila terjadi peningkatan investasi. Pada kenyataannya, penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia tidak sesederhana seperti gambaran di atas. Meningkatnya investasi belum tentu setara dengan laju peningkatan lapangan kerja.

Menurut Bappenas (2003) menurunnya penciptaan lapangan kerja terjadi setelah krisis ekonomi dan ini disebabkan oleh adanya perubahan hubungan industrial yang drastis sejak tahun 1998. Reformasi politik dan demokrasi telah memberi kesempatan bagi pekerja untuk berpartisipasi dalam penetapan kondisi dan standar kerja. Namun, perubahan tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian dalam hubungan industrial sehingga lebih sering terjadi konflik dan pemogokan yang merugikan baik bagi pekerja maupun pemberi kerja (Bappenas, 2003 : IV-16-17). Selain itu, berbagai kebijakan ketenagakerjaan diindikasikan sebagai salah satu penyebab terjadinya penurunan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan tersebut di antaranya adalah kebijakan yang menyangkut penetapan upah minimum serta kebijakan yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan pemberian pesangon. Kebijakan tersebut dirasakan memberikan porsi perlindungan yang lebih besar kepada pihak pekerja.

Ada suatu kecenderungan penerapan peningkatan upah minimum dalam skala cukup tinggi memberikan dampak negatif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Penerapan upah minimum tersebut berdampak ganda, tidak hanya terhadap pemberi kerja yang memang belum menerapkan upah sesuai dengan standar minimum, tetapi juga bagi pemberi kerja yang sebetulnya telah menerapkan upah di atas upah minimum. Bagi perusahaan tersebut (terutama perusahaan besar), peningkatan upah minimum berdampak secara psikologis. Agar tidak menimbulkan adanya perbedaan

antara upah tenaga kerja perusahaannya dan perusahaan lain yang masih menerapkan upah tenaga kerja di bawah standar, perusahaan tersebut terpaksa harus meningkatkan pemberian upahnya. Ini dapat menjadi penghambat penyerapan tenaga bagi perluasan usaha.

Selain itu, ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemberian pesangon yang lebih berpihak pada pekerja berakibat terjadi kecenderungan penggunaan mesin sebagai pengganti manusia. Hal-hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan pergeseran usaha dari yang mulanya padat karya menjadi suatu usaha yang relatif padat modal. Secara tidak langsung, ini akan berpengaruh terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, kebijakan ketenagakerjaan tidak dapat dipandang sebagai satu bagian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari rangkaian penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Di sisi lain, akibat rendahnya pemahaman sumber daya manusia di Indonesia umumnya, pekerja kurang dapat menyadari dampak jangka panjang tuntutan peningkatan upah terhadap keberlangsungan suatu usaha. Fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, tercatat beberapa perusahaan besar mengalihkan lokasi usahanya ke tempat lain di luar Indonesia yang dianggap lebih memiliki iklim usaha kondusif.

Tidak terlepas dari hal itu, rendahnya pemahaman sumber daya manusia di Indonesia, umumnya terkait dengan tingkat pendidikan. Seperti yang telah diutarakan di atas, sebagian besar pekerja di Indonesia ($\pm 70\%$) memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat juga dipandang sebagai salah satu bagian dari rangkaian penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Hasil perhitungan korelasi statistik memperlihatkan bahwa secara umum terdapat ketimpangan penyerapan tenaga kerja di wilayah KBI dan KTI. Ini ditunjukkan dengan hasil korelasi antara investasi PMDN dan PMA terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja sebagai buruh tetap. Di wilayah KBI hasil korelasi relatif kuat (+0,65). Sementara untuk wilayah KTI kebalikannya (-0,23). Hal ini mengindikasikan beberapa hal, antara lain pekerja di wilayah KTI umumnya bukan penduduk lokal, tetapi umumnya dari wilayah KBI. Kondisi ini sejalan dengan fenomena ketersediaan angkatan kerja di KTI yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan KBI (lihat Tabel 3). Selain itu, mungkin juga terkait dengan jenis usaha yang ada relatif padat modal. Namun, pola yang sama tidak seluruhnya terjadi di region-region KTI. Di Pulau Kalimantan, meskipun tidak sekuat nilai korelasi region-region di KBI, hasil korelasi bersifat lemah positif (+0,15). Inipun sebetulnya didukung oleh keberadaan investasi PMDN.

Untuk wilayah KBI, korelasi terkuat terjadi di Sumatra. Korelasi investasi PMDN dan PMA terhadap penyerapan buruh tetap di region tersebut sangat kuat (+0,90). Ini dapat mengindikasikan bahwa peningkatan investasi akan diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sementara, untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali, menunjukkan nilai korelasi sedang (+0,47).

Jika dibandingkan antara investasi PMDN dan PMA, investasi PMDN pada wilayah Sumatra lebih membuka peluang kesempatan kerja dibandingkan dengan investasi PMA. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi investasi PMDN terhadap buruh tetap di Sumatra relatif kuat (0,83), sedangkan korelasi investasi PMA terhadap buruh tetap lebih rendah (0,75). Fenomena ini dapat mengindikasikan jenis usaha yang berkembang di wilayah Sumatra adalah jenis usaha yang lebih bersifat padat karya. Sebaliknya di Pulau Jawa dan Bali, investasi PMA yang lebih menciptakan lapangan kerja ketimbang investasi PMDN. Hasil korelasi antara investasi PMA terhadap buruh tetap relatif sedang (0,53), sedangkan hasil korelasi antara investasi PMDN dan buruh tetap sangat lemah (0,15). Jika dilihat kualitas sumber daya manusianya, Pulau Jawa dan Bali memiliki kualitas sumber daya lebih baik tertimbang Sumatra. Dengan demikian, lebih rendahnya nilai korelasi Pulau Jawa dan Bali dibandingkan dengan Pulau Sumatra dapat mengindikasikan bahwa bukan faktor sumber daya manusia yang menjadi penyebabnya, melainkan faktor jenis usaha. Dalam hal ini ditunjukkan oleh jenis usaha yang berkembang pada region tersebut adalah jenis usaha yang lebih bersifat padat modal. Selain itu, kemungkinan juga terkait dengan jiwa kewirausahaan yang dimiliki masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Masyarakat wilayah tersebut cenderung untuk memilih bekerja sendiri/*self employer*.

Peranan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan lapangan kerja sebagai *employer* atau berusaha dengan buruh tetap jelas terlihat melalui hasil korelasi antara investasi dan tenaga kerja yang bekerja sebagai *employer*. Di Jawa dan Bali yang memiliki kualitas sumber daya manusia lebih baik tertimbang Pulau Sumatra, hasil korelasi memperlihatkan nilai lebih kuat dibandingkan dengan Sumatra. Ini ditunjukkan dengan nilai korelasi investasi PMA terhadap *employer* di Jawa dan Bali cukup kuat (0,65), sementara di Pulau Sumatra relatif sedang (0,44).

Jika dibandingkan dengan investasi PMDN dan PMA, investasi PMA ternyata lebih memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja sebagai *employer*. Ini diilustrasikan dengan nilai korelasi investasi PMA terhadap pekerja *employer* sebesar +0,65, sementara nilai korelasi investasi PMDN terhadap pekerja *employer* hanya sekitar +0,24. Kesenjangan nilai korelasi antara investasi PMA terhadap *employer* sebagai yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali tersebut banyak terkait dengan sifat masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan di region tersebut.

Tumbuhnya jiwa kewirausahaan masyarakat Pulau Jawa dan Bali lebih jelas terlihat dari perbandingan nilai korelasi antara investasi PMA terhadap *employer* dan antara investasi PMA dengan buruh tetap. Korelasi kelompok pertama lebih tinggi (0,65) ketimbang kelompok kedua (0,53). Di lain pihak, penciptaan lapangan kerja sebagai *employer* memberikan dampak ganda terhadap dunia ketenagakerjaan, yaitu memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja bagi buruh tetap di bawahnya meskipun buruh tersebut berupa buruh *unskill* sekalipun. Selanjutnya, ini akan berdampak terhadap pengurangan masalah pengangguran di Indonesia. Dengan demikian, melihat tingginya dampak keberadaan investasi PMA terhadap dunia

ketenagakerjaan, investasi di lingkup PMA tersebut perlu lebih didorong untuk lebih berkembang.

Melihat besarnya peranan keberadaan investasi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan; penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan hal penting bagi jalannya roda perekonomian negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan dalam rangka meningkatkan investasi, ekspor dan kesempatan kerja. Berbagai tindakan tersebut antara lain, perbaikan pada iklim investasi, hubungan ketenagakerjaan, fasilitas industri dan perdagangan, reformasi hukum, keamanan dan memperbaiki tata kelola. Perbaikan tersebut di antaranya diterbitkannya undang-undang yang terkait dengan penyelesaian hubungan industrial, pengaturan yang menyetarakan perlakuan bagi investasi PMA dan PMDN, perbaikan kondisi investasi dan harmonisasi peraturan investasi untuk meningkatkan daya saing menarik investasi yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan serta diterbitkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Menko Perekonomian, 2004). Di sisi lain, dalam rangka harmonisasi peraturan daerah dalam konteks otda dan untuk lebih menghasilkan iklim investasi yang lebih kondusif; pemerintah telah mengkaji lebih dari 3.000 peraturan daerah. Dari jumlah tersebut, 161 perda telah dibatalkan oleh Mendagri dan 284 lainnya diminta oleh Mendagri agar dibatalkan oleh daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, sejalan dengan ekspektasi kondisi perekonomian dunia tahun 2004 lebih baik sebelumnya, membaiknya kinerja pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta fakta memperlihatkan adanya keterkaitan yang cukup kuat antara investasi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dunia ketenagakerjaan tahun 2004 diharapkan akan membaik.

RINGKASAN TEMUAN

Paparan di atas telah mengulas kemajuan penanaman modal setelah masa krisis ekonomi dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan kerangka waktu tertentu, data 2000-01 untuk investasi disertai dampak tenaga kerja pada tahun berikutnya 2002-03. Beberapa butir temuan dan ringkasan penting untuk dicatat.

Pertama, Pemerintah telah meletakkan prioritas utama pada program yang menuju pada langkah-langkah guna mengatasi pasca-IMF dan dorongan ekspor serta investasi, melalui Inpres No 5/2003 dan Keppres 87/2003. Keduanya merupakan langkah-langkah kebijakan strategis untuk menarik investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Kedua, dalam perspektif regional, profil investasi untuk masing-masing wilayah sangat bervariasi. Untuk KBI, investasi dua kali lipat lebih besar daripada KTI. Investasi asing lebih dominan di KBI, khususnya di Jawa. Sementara di KTI, investasi domestik lebih dominan yang ditunjukkan Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Ketiga, investasi domestik, menyebar di sektor-sektor tradisional dan ini banyak disebabkan oleh ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki daerah, seperti di

Sumatra dengan pertanian dan migas, Sulawesi dengan pertanian, Papua dengan migas dan tambang. Sementara sektor-sektor modern seperti industri farmasi dan kimia umumnya berkonsentrasi di Jawa.

Keempat, kualitas SDM di Indonesia umumnya masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya pencapaian tingkat pendidikan pekerja. KTI sangat menonjol profilnya, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan serta Papua; sementara di KBI adalah Jambi, Lampung, dan Jawa Tengah. Sekitar 70% tenaga kerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan rendah. Perusahaan-perusahaan cenderung menentukan standar keterampilan pekerja dengan tingkat pendidikan yang memadai guna mencapai nilai produktivitas tinggi, sebab dengan pendidikan tinggi, produktivitas akan meningkat.

Kelima, dalam kaitannya dengan tingkat korelasi antara buruh tetap dan investasi, terdapat pola yang kontras antara KBI dan KTI. Tenaga kerja formal memiliki korelasi positif dan kuat di KBI; sebaliknya di KTI, korelasinya negatif dan relatif lemah. Di KBI, korelasi kuat tampak di Sumatra yang berarti induksi investasi memberi dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja akibat tingkat pendidikan yang tinggi. Investasi domestik menyebar di Sumatra dan mempunyai akses terhadap penyerapan tenaga kerja yang padat karya; sementara di Jawa dan Bali tidak demikian halnya.

Dengan demikian, secara keseluruhan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia perlu mempertimbangkan butir-butir penting di atas guna mendorong penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta peningkatan pembangunan daerah. Tidak mengherankan jika pemerintah pusat mengeluarkan Inpres No 3/2006 tentang Peningkatan Iklim Investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2002. *Laporan tahunan*
- Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id>. Indonesia. 31 Desember 2003 dan 23 Maret 2004.
- BKPM. <http://www.bkpm.go.id>. Indonesia. 10 April 2006
- Bappenas. 2003. *Perekonomian Indonesia Tahun 2004: Prospek dan Kebijakan*.
- Basri, M. Chatib and Pierre van der Eng (Eds.). 2004. *Business in Indonesia: New Challenge, Old Problems*. Singapore: ISEAS Publication.
- Kantor Menko Perekonomian. <http://www.ekon.go.id>. Indonesia. 25 Maret, 23 Juni 2004 dan Mei 2006.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2004. *Laporan Kemajuan Implementasi Kebijakan Ekonomi* (White Paper) September 2003-Februari 2004.
- Koestoer, Raldi Hendro. 2002. "Strategi Kebijakan Investasi Kehutanan di Tingkat Regional: Suatu Pemikiran". *Jurnal Geografi*, (4): 26–33.
- Kompas. 2002. Hasil Kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Daerah yang Semena-mena Akan Merana, 25 Januari, p. 15

- Sitawati, A. 2002. "Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten". *Tesis*. FMIPA-UI. Agustus 2002. Hal. 48
- Sugiyarto, Guntur and Raldi H. Koestoer. 2005. "Investment Climate in Indonesia: The Main Impediment, Economic Costs and Policy Implications". Makalah disajikan dalam *International Conference on Mining Indonesia 2005*, IMA Jakarta, September.